



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke	: 13
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 18 Juni 2019
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2020 dan RKP Tahun 2020 (RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2020) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
Ketua Rapat	: H. Iskan Qolba Lubis, M.A.
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 27 dari 49 Anggota Komisi VIII DPR RI 2. 6 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI IZIN 3. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 11.05 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII H. Iskan Qolba Lubis, M.A. Wakil Ketua Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M. Sc dan H. Marwan Dasopang, M.Si, dan TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

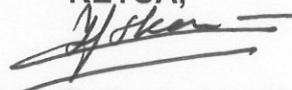
Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan agenda “**Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2020 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2020)**” disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI menolak pagu indikatif yang dijelaskan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang RAPBN Tahun Anggaran 2020 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2020 sebesar Rp 236.641.802.000,- (*Dua Ratus Tiga puluh Enam Miliar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah*). Pagu Anggaran indikatif dinilai terlalu kecil untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
2. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI melakukan pembicaraan ulang *Trilateral Meeting* bersama Menteri Keuangan RI dan Bappenas agar merubah alokasi RAPBN Tahun Anggaran 2020 atau dikembalikan minimal seperti Tahun Anggaran 2019.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.00 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



H. Iskan Qolba Lubis, M.A.